

Nama : Binti Alviani

NPM : 2213031082

Mata Kuliah : Ekonomi Industri

Kelas C Pendidikan Ekonomi 2022

CASE STUDY

Soal dan Jawaban

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, termasuk **nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet**. Namun, selama puluhan tahun, Indonesia lebih banyak berperan sebagai **eksportir bahan mentah** dalam Global Value Chains (GVCs). Contohnya, Indonesia mengekspor bijih nikel ke negara lain, yang kemudian mengolahnya menjadi baterai kendaraan listrik dan menjualnya dengan nilai tambah yang tinggi.

Pemerintah Indonesia kini berusaha **mengubah posisi dalam GVC**, dari pemasok bahan mentah menjadi **produsen barang setengah jadi atau jadi**, lewat kebijakan **hilirisasi industri**, larangan ekspor bahan mentah, dan pemberian insentif investasi dalam pengolahan lokal. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, baik dari pelaku industri dalam negeri maupun negara mitra dagang seperti Uni Eropa, yang bahkan menggugat Indonesia ke WTO.

Pertanyaan:

1. Analisis Konteks:

- a. Apa saja kelebihan dan kekurangan posisi Indonesia dalam GVC saat ini?
- b. Mengapa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC?

2. Evaluasi Kebijakan:

- a. Apakah kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC? Jelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan geopolitik.
- b. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang?

3. Sintesis dan Solusi:

Jika Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah, strategi apa yang akan Anda usulkan agar Indonesia mendapatkan nilai tambah lebih besar dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional?

Jawaban:

1. Analisis Konteks

a. Kelebihan dan kekurangan posisi Indonesia dalam GVC saat ini

Posisi Indonesia sebagai pemasok bahan mentah mempunyai kelebihan yang nyata yaitu ketersediaan sumber daya alam dalam jumlah besar (nikel, kelapa sawit, karet) memberikan basis komparatif untuk menarik investasi awal, menciptakan pemasukan ekspor yang stabil, dan menyediakan kesempatan untuk pengembangan industri hilir jika kebijakan dan investasi diarahkan ke sana. Selain itu peran sebagai pemasok bahan mentah seringkali memberikan leverage geopolitik jangka pendek di sektor-sektor strategis seperti baterai EV. Namun kelemahan strukturalnya juga signifikan yaitu volume ekspor tinggi tidak otomatis berujung pada penangkapan nilai tambah (value capture) karena pengolahan lanjut sering terjadi di negara lain sehingga pendapatan domestik per unit turun, penciptaan lapangan kerja terampil terbatas, dan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas meningkat. Posisi ini juga berisiko menciptakan ekonomi yang tergantung pada komoditas dengan intensitas modal yang rendah dan volatilitas pendapatan tinggi. Pernyataan resmi dan analisis akademik mengenai pola downstreaming dan karakteristik ekspor Indonesia mengonfirmasi dualitas peluang dan risiko tersebut.

b. Mengapa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah optimal dalam GVC

Gagalnya penangkapan nilai tambah (under-capture) berasal dari kombinasi faktor supply-side dan policy-design. Pertama, keterbatasan kapabilitas domestik investasi R&D rendah, kapasitas manufaktur dan teknologi pemrosesan masih terbatas, serta kekurangan tenaga kerja terampil membuat investor asing lebih mudah membangun fasilitas pengolahan yang terpisah dari rantai pasok lokal. Kedua, keterbatasan linkages biaya logistik tinggi, rantai pasok komponennya lemah, dan pasokan energi/transportasi yang belum kompetitif mengurangi attractiveness untuk kluster hilirisasi yang terintegrasi. Ketiga, desain kebijakan yang tidak selalu konsisten atau terlalu kasar (coarse) misalnya larangan ekspor mentah yang diberlakukan cepat tanpa skema transisi yang memadai atau tanpa persyaratan kinerja yang jelas bisa memicu respons negatif seperti pengalihan investasi ke negara lain atau tantangan

hukum internasional. Keempat, faktor eksternal GVC seperti sifat industri (kapital intensif, teknologi tinggi) dan kemampuan negara lain untuk menawarkan paket insentif dan infrastruktur yang lebih menarik (Vietnam, Malaysia) juga membuat upaya naik rantai lebih sulit.

2. Evaluasi Kebijakan

- a. Apakah kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel efektif untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC?

Secara teori, kebijakan hilirisasi (downstreaming) dapat meningkatkan peluang nilai tambah domestik dengan memaksa munculnya kapasitas pengolahan lokal, menarik investasi pabrik pemurnian/smelter, dan menciptakan multiplier ekonomi ketika dirancang dan diimplementasikan dengan benar, kebijakan ini mendorong transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun efektivitas praktis sangat bergantung pada *sequencing*, desain instrumen, dan kelengkapan ekosistem pendukung. Jika larangan ekspor diterapkan secara tiba-tiba tanpa jaminan investasi hilir, insentif berbasis kinerja, atau dukungan pembiayaan untuk pengusaha lokal, maka hasilnya bisa kontraproduktif investor potensial bisa beralih lokasi, korporasi asing membangun kapasitas hilir di negara lain, atau implikasi hukum perdagangan internasional muncul (misalnya sengketa WTO). Larangan ekspor bisa meningkatkan posisi dalam GVC, tetapi hanya jika diiringi dengan paket kebijakan komprehensif (insentif terikat prestasi, dukungan modal, pembangunan klaster, peningkatan kapabilitas supplier, dan jaminan kepastian regulasi).

- b. Dampak terhadap hubungan dengan negara mitra dagang

Kebijakan hilirisasi yang bersifat restriktif sering memicu ketegangan diplomatik dan potensi sengketa perdagangan contoh nyata adalah tantangan hukum di WTO mengenai pembatasan ekspor sumber daya, serta reaksi perdagangan atau ancaman tindakan pembalasan ekonomi oleh mitra dagang yang merasa dirugikan. Selain aspek hukum, ada juga konsekuensi ekonomi-politik, negara importir yang kehilangan pasokan murah mungkin mencari pemasok alternatif atau mengintegrasikan ke dalam strategi industri domestik yang mengurangi ketergantungan pada Indonesia. Di sisi lain, jika kebijakan dipandang diskriminatif, peluang kerja sama investasi jangka panjang bisa menurun. Namun, dampak tidak selalu negatif, kebijakan yang transparan dan disertai dialog bilateral dapat diarahkan untuk menarik investasi hilir melalui kemitraan strategis (joint ventures,

technology transfer agreements) dan mitigasi risiko sengketa hal ini menunjukkan pentingnya diplomacy ekonomi aktif dan penataan ulang hubungan perdagangan agar kebijakan domestik tidak otomatis menimbulkan isolasi atau litigasi panjang.

3. Sintesis dan Solusi Strategi Kebijakan yang Disarankan (sebagai penasihat ekonomi pemerintah)

Visi kebijakan yaitu menaikkan nilai tambah domestik secara bertahap melalui paket kebijakan terintegrasi yang menggabungkan insentif bertingkat, pengembangan kapabilitas, perbaikan infrastruktur, dan diplomasi perdagangan proaktif tanpa memutus hubungan dagang internasional. Rangka strategi praktis berikut menyeimbangkan ambisi hilirisasi dengan kepentingan hubungan internasional:

- a. Policy sequencing & conditionality (gradualitas daripada larangan mutlak)
 - Alih-alih larangan ekspor total yang tiba-tiba, terapkan *phased restrictions* yang memberi waktu transisi kepada eksportir dan pasar internasional, serta mensyaratkan *performance requirements* bagi investor hilir (target local content, target serapan tenaga kerja lokal, roadmap transfer teknologi) agar insentif dan akses pasar ke fasilitas hilir dikaitkan dengan deliverables konkret. Instrumen: izin ekspor sementara, kuota transisi, atau pengecualian bersyarat. Rasional: mengurangi shock di pasar internasional dan memberi ruang bagi investasi hilir terencana.
- b. Paket insentif terikat kapabilitas & local content
 - Berikan insentif fiskal (tax holiday/credit), pembiayaan murah, atau matching grants yang hanya berlaku bila perusahaan memenuhi target produksi hilir, local procurement, dan program pelatihan lokal. Gunakan kontrak investasi yang mengikat deliverables (training, R&D joint projects, supplier development). Rasional: mengarahkan investor untuk benar-benar membangun ekosistem lokal bukan sekadar memanfaatkan ketersediaan bahan mentah. (Contoh: insentif berjenjang yang meningkat seiring pemenuhan target).
- c. Pengembangan rantai pasok domestik & SME upgrading
 - Meluncurkan program supplier development untuk UKM (akses teknologi, kredit terjangkau, standar kualitas), fasilitasi pembentukan klaster industri di SEZ/industrial park dengan infrastruktur shared services (logistik, energi, laboratorium mutu). Rasional: memperbesar peluang spillover dan mengurangi enclave investment.

- d. Investasi kapabilitas manusia dan R&D
- Perbesar dana untuk vokasi, apprenticeship, dan pusat kompetensi sektor (industry training centers) yang dikoordinasikan dengan industry, tingkatkan insentif R&D (tax credits, dana matching) dan dorong kolaborasi universitas-industri untuk mengembangkan teknologi pengolahan yang adaptif terhadap kondisi lokal. Rasional: nilai tambah datang dari kemampuan memproses dan mendesain produk, bukan sekadar pemasokan bahan mentah.
- e. Perbaikan infrastruktur & pengurangan biaya logistic
- Prioritaskan proyek logistik, energi, dan konektivitas yang menurunkan biaya produksi (pelabuhan, rel, pasokan listrik), termasuk insentif energi hijau untuk smelter agar memenuhi standar ESG global. Rasional: biaya tinggi membuat hilirisasi tidak kompetitif.
- f. Diplomasi perdagangan proaktif & compliance-aware design
- Jalankan diplomacy untuk menjelaskan tujuan pembangunan industri, cari mitra investasi bilateral (joint ventures), dan desain kebijakan yang non-diskriminatif serta WTO-aware (gunakan instrument yang dapat dipertahankan di forum internasional). Jika menghadapi gugatan, siapkan pembelaan berbasis kebijakan industri yang sah dan upaya negosiasi. Rasional: meminimalkan risiko retaliatory measures dan menjaga akses pasar.
- g. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pilot territorial
- Terapkan pilot terfokus (2–3 kawasan hilirisasi) dengan paket lengkap (insentif, training, infrastruktur) yang dievaluasi lewat KPI yaitu share manufaktur output, lokal content ratio, investasi R&D, serapan tenaga kerja. Skema ini memungkinkan pembelajaran dan penyesuaian sebelum skala nasional.
- h. Jaminan lingkungan & keberlanjutan (ESG)
- Integrasikan standar lingkungan dan sosial dalam persyaratan investasi hilir; dorong teknologi pengolahan bersih untuk mengurangi resistensi publik dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang memprioritaskan ESG.

Kebijakan yang agresif tapi kasar (larangan total tanpa mitigasi) berisiko menimbulkan litigasi dan pengalihan investasi yaitu kebijakan bertahap, berbasis kinerja, dan disertai paket dukungan kapabilitas domestik serta diplomasi akan memberi peluang lebih besar untuk menaikkan nilai tambah tanpa merusak hubungan dagang. Implementasi memerlukan koordinasi lintas-kementerian, alokasi anggaran untuk kapabilitas, serta

dialog intensif dengan mitra dagang agar kebijakan dapat dipahami sebagai upaya pembangunan ekonomi yang sah dan sejalan dengan kewajiban internasional.